



ANALISIS BELANJA DAERAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Septa Soraida

Dosen Akuntansi Universitas Palangka Raya

soraidasepta@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze spending on the West Kotawaringin district government in 2018-2020. The results of this study indicate that the year of growth in regional expenditures increased in 2019 and decreased in 2020. The Expenditure Conformity Analysis shows that in 2018-2020 the West Kotawaringin district government tends to have more operational expenditures compared to capital expenditures and the analysis of the level of efficiency of expenditures shows an average of 93.33% means that the level of conformity between the budget and realization is in the efficient criteria.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja pada pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018-2020 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahun pertumbuhan belanja daerah mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Analisis Keserasian belanja menunjukkan bahwa tahun 2018-2020 pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat cenderung lebih banyak belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal serta analisis tingkat efisiensi belanja menunjukkan rata-rata sebesar 93,33% artinya tingkat kesesuaian antara anggaran dan realisasi berada dalam kriteria efisien.

PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan wujud dari keseriusan pemerintah untuk mengubah sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik. Kedua agenda tersebut kemudian disahkan dalam undang-undang dengan didasarkan pada ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Otonomi daerah berarti pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki baik dari segi keuangan, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang termasuk dalam kekayaan pemerintah daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2012) implikasi dari penerapan otonomi daerah yaitu daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan, peran, prakarsa serta memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu dibutuhkan sumber daya keuangan sebagai salah satu factor pendukung pelayanan. Sumber daya tersebut tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam APBD tidak hanya mengestimasi berapa pendapatan yang akan diperoleh tetapi juga mengestimasi berapa belanja yang akan dikeluarkan.

Belanja daerah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006, dapat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dilakukan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintah, belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dilakukan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program maupun 23 kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai salah satu kabupaten yang diberikan wewenang untuk mengurus sendiri urusannya termasuk dalam hal upaya untuk memperoleh pendapatan dan belanja daerah. Dampak dari kewenangan tersebut mewajibkan pemerintah kabupaten Kotawaring Barat untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang berada dalam kewenangannya melalui laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa terdapat kenaikan anggaran dari tahun 2018-2020 baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja. Oleh sebab itu penting untuk diketahui kecenderungan belanja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018-2020.

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kecenderungan belanja daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018-2020.

LANDASAN TEORI

Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; (b) Pendapatan transfer; dan (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan sumber daya, salah satunya yaitu sumber daya keuangan yang tercantum dalam pendapatan daerah, pendapatan daerah tidak hanya pendapatan yang diperoleh oleh daerah itu sendiri tetapi juga dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat. Selain mengelola pendapatan pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengelola belanja dengan menerapkan prinsip value for money yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih maksimal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010) laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Ada beberapa alasan utama pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu: pertama, Dari sisi internal laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemda dan DPRD. kedua Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari Laporan Realisasi APBD kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018-2020.

Sumber Data

Sumber Data Dalam penelitian ini data bersumber dari Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat

Analisis Data

Analisis Data Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Analisis pertumbuhan belanja daerah, Analisis keserasian belanja daerah dan Rasio efisiensi belanja daerah.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Menurut Mahmudi (2010) Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{realisasi belanja tahun } t - \text{realisasi belanja tahun } t - 1}{\text{realisasi belanja tahun } t - 1} \times 100\%$$

Analisis KecerAsian Belanja

Menurut Mahmudi (2010) analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja. Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen. Menurut Mahmudi (2010) Pertumbuhan rasio belanja operasi terhadap total belanja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap total belanja} = \frac{\text{rasio belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010). Menurut Halim (2004) belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan berdampak pada peningkatan aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya juga akan meningkatkan belanja rutin untuk biaya pemeliharaan aset tersebut. Artinya belanja modal tidak hanya belanja yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang baru akan tetapi juga termasuk belanja yang digunakan untuk memelihara atau menambah masa manfaat aset tersebut.

Belanja modal merupakan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Mahmudi (2010) Rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{rasio belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Rasio efesiensi belanja daerah

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja menghitung seberapa besar kesesuaian antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang telah dilakukan. Menurut Mahmudi (2010) rasio efisiensi belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis pertumbuhan belanja daerah

Tabel 1 Rasio Perkembangan pertumbuhan belanja daerah

Tahun	Belanja Daerah	Pertumbuhan
2018	1.148.404.772.109,21	0,18
2019	1.231.618.091.575,60	7,24
2020	1.285.167.321.840,80	4,34
Rata-rata		3,92

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 rasio belanja sebesar 0,81 artinya terjadi kenaikan sebesar 0,81% dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2017 sedangkan tahun 2019 terjadi kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar 7,24 artinya terjadi kenaikan belanja daerah sebesar 7,24% jika dibandingkan dengan tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2020 rasio pertumbuhan sebesar 4,34 artinya ada kenaikan realisasi belanja sebesar 4,34% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019.

2. Analisis keserasian belanja daerah

a) Analisis Keserasian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah

Tabel 2 Rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Proporsi
2018	807.645.989.969,09	1.148.404.772.109,21	70,32
2019	873.780.401.338,31	1.231.618.091.575,60	70,94
2020	858.901.457.730,67	1.285.167.321.840,80	66,83
Rata-rata			69,36

Sumber : BPKAD kabupaten Kotawaringin Barat (Data diolah)

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 proporsi belanja operasi dari total belanja daerah adalah sebesar 70,32% dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan

sebesar 0,62% dibandingkan realisasi belanja tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2020 terjadi penurunan proporsi belanja yaitu sebesar 4,11% jika dibandingkan dengan proporsi belanja tahun 2019. Tingginya belanja operasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat lebih banyak menggunakan anggaran belanja daerah untuk kegiatan yang bersifat operasional salah satunya adalah untuk membayar gaji pegawai dibandingkan dengan belanja modal.

b) Analisis Keserasian Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Tabel 3 Rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Proporsi
2018	340.758.782.140,12	1.148.404.772.109,21	29,67
2019	357.837.690.237,29	1.231.618.091.575,60	29,05
2020	377.055.194.475,77	1.285.167.321.840,80	29,33
Rata-rata			29,35

Sumber : (Data diolah)

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 29,67 artinya belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2018 masih dibawah 30% dan pada tahun 2019 proporsi belanja daerah cenderung menurun sebesar 0,62% dibandingkan dengan tahun 2018 sedangkan tahun 2020 belanja daerah Kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 29,33 artinya ada kenaikan sebesar 0,28% dibandingkan dengan tahun 2019. Secara keseluruhan belanja proporsi belanja modal cenderung lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasional.

3. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Tabel 4 Rasio keserasian realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Proporsi
2018	1.148.404.772.109,21	1.226.802.997.399,00	93,60
2019	1.231.618.091.575,60	1.328.400.726.000,00	92,71
2020	1.285.167.321.840,80	1.371.694.796.548,00	93,69
Rata-rata			93,33

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja pada tahun 2018 sebesar 93,60 artinya bahwa antara realisasi dan anggaran tidak mengalami perbedaan yang signifikan dan pada tahun 2019 proporsi realisasi belanja

daerah terhadap anggaran belanja mengalami penurunan sebesar 0,89 dibandingkan dengan tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 proporsi realisasi belanja daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar 93,69. Artinya secara keseluruhan rasio keserasikan realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah mencapai 90%.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan sumber daya yang berada dalam kewenangannya melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 sedangkan tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Rasio belanja operasi terhadap belanja daerah menunjukkan rata-rata sebesar 69,36 artinya secara keseluruhan belanja daerah kabupaten Kotawaringin Barat lebih diprioritaskan ke belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal padahal belanja modal yang ditinggi diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka Panjang terhadap perekonomian masyarakat. Rasio efisiensi belanja daerah tahun 2018-2020 menunjukkan rata-rata sebesar 93,33 artinya rasio efisiensi belanja daerah masuk dalam kriteria efisien.

SARAN

Adapun saran yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat yaitu optimalisasi belanja modal karena belanja modal memiliki dampak sangat sangat besar terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kabupaten Kotawaringin Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Mahmudi. 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.